

Sepuluh Praktik Terbaik Pemerintah untuk Melindungi Ruang Sipil dan Kebebasan Sipil selama Pandemi COVID

AFSC meminta semua pemerintah untuk berkomitmen menjalankan praktik terbaik berikut selama pandemi:

1. Pemerintah harus mengakui hak akses internet dan sepatutnya bertanggung jawab dalam mempertahankan akses internet selama pandemi. Orang harus dimampukan untuk mengakses informasi pada saat isolasi.
2. Pemerintah harus memastikan kebebasan dan independensi media dan tidak menahan, menuduh, atau menghukum suara-suara ketaksetujuan. Penyensoran informasi oleh negara tidak sejalan dengan prinsip demokrasi.
3. Apabila hendak mendeklarasikan keadaan darurat, pemerintah harus memberitahukan kepada penduduk maksud dari keadaan darurat tersebut, tempat pemberlakuannya, kriteria untuk mempertahankan pemberlakuannya, dan durasi pemberlakuan keadaan darurat tersebut.
4. Informasi yang diperoleh melalui pengawasan digital harus ditinjau dan ditangani oleh sebuah badan nonpemerintah, dengan memastikan transparansi dan justifikasi penggunaan, penyimpanan, serta akses data.
5. Pemerintah harus berbuat semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa tidak satu orang pun mengalami pengusiran dari tempat tinggalnya selama pandemi dan bertindak cepat untuk membantu orang dengan kondisi tempat tinggal yang tidak memadai dan tanpa akses air dan sanitasi. Pemerintah sepatutnya mengetahui bahwa warga yang tinggal di lingkungan yang terlalu padat tidak mungkin dapat mematuhi aturan pembatasan sosial. Pihak otoritas sepatutnya bersungguh-sungguh dalam mencegah ketunawismaan. Apabila orang tidak mampu membayar cicilan atau uang sewanya, tangguhkan pengusiran dan tunda pembayaran.
6. Pemerintah harus mencegah atau memitigasi penutupan atau perusakan pasar atau lokasi lain tempat orang mencari nafkah hariannya.
7. Pemerintah harus memungkinkan Organisasi Masyarakat Sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melaksanakan pekerjaannya, dan mengakui bahwa kerja sama dengan kelompok-kelompok ini justru mendukung kepentingan pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan penduduk.
8. Pemerintah harus membantu kelompok-kelompok masyarakat seperti narapidana, orang dengan disabilitas, warga yang tinggal di kamp pengungsian, dan area-area tinggal warga migran yang lebih rentan terhadap virus.
9. Pemerintah sepatutnya memastikan bahwa aparaturnya seperti kepolisian, khususnya terkait dengan penegakan aturan pembatasan, mengikuti praktik terbaik. Penggunaan kekuatan yang serampangan dan kekerasan tidak dapat diterima. Seluruh

elemen masyarakat mesti dilibatkan dalam menyusun cara mengurangi penularan virus yang efektif.

10. Para pemimpin politik dan tokoh-tokoh berpengaruh lain sepatutnya mengecam stigma dan rasisme yang ditimbulkan pandemi. Negara sepatutnya memastikan bahwa berbagai respons yang dilakukan tidak menjadikan penduduk atau sektor masyarakat tertentu lebih rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi.